



RENJA TAHUN 2023

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini akhirnya dapat diselesaikan. Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

Telah disusun dan diterbitkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggaran 2023 guna pengelolaan kegiatan perencanaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena seperti yang diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuannya sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta usaha untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif maka diperlukan adanya Penyusunan perubahan atas Renja 2022 tersebut.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) perubahan ini dapat digunakan sebagai acuan/Pedoman dalam penyusunan Perencanaan anggaran di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Paringin, Juli 2022

Kepala Dinas,



Drs. Urai Nu/ Iskandar, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19/30501 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	59
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	61
3.3 Rencana Program dan Kegiatan	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	73
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023.....	73
4.2 Analisis Sosial Ekonomi.....	80
BAB IV PENUTUP.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan setargetis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode tahun 2023.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021

tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah, Yang sebelumnya merupakan gabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang berdiri sendiri. Namun dikarenakan adanya perampingan perangkat daerah (PD), maka penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial digabung menjadi satu kesatuan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah dengan lebih menekankan pada peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak guna mewujudkan kesetaraan, keadilan gender dan memenuhi hak-hak anak dan perempuan pada seluruh aspek kehidupan di masyarakat, serta peningkatan status/klasifikasi desa minimal maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
8. Instruksi Presiden Nomor 09 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
18. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tah2018).
19. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang pemberntukan dan susunan daerah Kabupaten Balangan
20. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten bLangan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implemementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Perhubungan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan memberikan pelayanan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan dan penyusunan rencana anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023. Sehingga setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program dan kegiatan secara terencana, terarah, tertib, dan disiplin sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dapat dicapai secara optimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstras Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang didasarkan pada Renstra Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah tentang peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak guna mewujudkan kesetaraan, keadilan gender dan memenuhi hak-hak anak dan perempuan pada seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Serta peningkatan

status/klasifikasi desa minimal maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM yang dilaksanakan secara berkelanjutan, terintegrasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, memuat tujuan, sasaran dan strategi yang realistis. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan tahun 2021 dengan tahun 2022, ada perubahan yang cukup signifikan terkait indikator kinerja, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2023 Jumlah Program sebanyak 15 (lima belas), sedangkan jumlah kegiatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh), dan sub kegiatan sebanyak 62 (enam puluh dua).

Dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 berjumlah Rp.15.387.839.722,- yang meliputi belanja operasional berjumlah Rp.13.673.339.722,- yang terdiri dari belanja pegawai berjumlah Rp. 3.116.257.880,- belanja barang dan jasa berjumlah Rp. 9.443,192.646,- dan belanja bantuan sosial berjumlah Rp.1.113.889.196,- dan belanja modal berjumlah Rp.15.387.839.722,-. Pada tahun 2021 anggaran yang berhasil direalisasi sebesar Rp. 9.864.206.623,- atau sekitar 64 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.2
 Realisasi Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
 Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp	Rp	%
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Nilai(Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakip)	Rp. 4.407.321.776	Rp. 2.564.781.427	58,19 %
		Persentase Pencatatan Aset dalam Kondisi Baik			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	Rp. 21.510.000	Rp. 13.181.000	61 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Rp. 13.410.000	Rp. 8.234.000	61 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp. 8.100.000	Rp.4.947.000	54 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Rp. 3.116.257.880	Rp. 1.675.430.258	54 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan	Rp. 3.116.257.880	Rp. 1.675.430.258	54 %

		tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 23.850.000	Rp. 17.378.000	73 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 23.850.000	Rp. 17.378.000	73 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Rp. 462.473.700	Rp. 403.736.984	87 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Rp. 10.731.100	Rp. 7.641.100	73 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Rp. 83.000.000	Rp.82.816.000	87 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Rp. 35138500	Rp.35.009.200	71 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Rp. 5.400.000	Rp. 2.600.000	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 328.204.100	Rp. 275.670.684	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengadaan sarana	Rp. 30.000.000	Rp. 26.070.000	87 %

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dan prasarana yang diadakan			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	Rp. 30.000.000	Rp. 26.070.000	87 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 55.4067.172	Rp. 264.224.812	48 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 225.768.052	Rp. 54.290.712	24 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 327.799.120	Rp.209.934.100	64 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 199.163.024	Rp. 164.760.373	83 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	Rp. 199.163.024	Rp. 164.760.373	83 %
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Rp. 390.646.900	Rp. 301.473.930	77 %
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100 %
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100 %

		Kementerian Sosial			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dari organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	Rp. 387.646.900	Rp. 298.473.930	77 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	Rp. 148.292.900	Rp. 131.312.930.	89 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	Rp. 43.910.000	Rp. 26.930.000	61 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi	Rp. 175.994.000	Rp. 128.765.000	73 %
		Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	Rp. 19.450.000	Rp. 11.466.000	59 %
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS(lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	Rp. 38.050.000	Rp. 24.830.000	65 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Jumlah Penyandang	Rp. 38.050.000	Rp. 24.830.000	65 %

	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	Rp. 10.900.000	Rp. 6.780.000	62 %
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	Rp. 22.900.000	Rp. 18.050.000	79 %
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Rp. 1.630.617.796	Rp. 1.063.144.603	65 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	Rp. 1.630.617.796	Rp. 1.063.144.603	65 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang divalidasi	Rp. 86.728.500	Rp. 64.828.000	75 %
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	Rp. 1.113.889.196	Rp. 592.500.000	53 %
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan	Jumlah Kelompok yang	Rp. 430.000.100	Rp. 405.816.603	94 %

	Ekonomi Masyarakat	mendapatkan bantuan KUBE			
		Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan			
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Rp. 185.000.000	Rp. 137.640.000	74 %
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	Rp. 150.000.000	Rp. 102.640.000	68%
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Rp. 150.000.000	Rp. 102.640.000	68%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	100 %
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	100 %
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	Rp. 29.300.000	Rp. 20.340.000	69 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	Rp. 29.300.000	Rp. 20.340.000	69 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Rp. 29.300.000	Rp. 20.340.000	69 %
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Rp. 660.025.000	Rp.537.924.000	
		Persentase ARG di	Rp. 60.025.000	Rp. 52.477.000	87 %

		SKPD/Lembaga/ Instansi di Kabupaten			
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Rp. 600.000.000	Rp. 485.447.000	81 %
		IPG (Indeks Pembangunan gender)			
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG	Rp. 60.025.000	Rp. 52.477.000	87 %
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	Rp. 60.025.000	Rp. 52.477.000	87 %
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Rp. 600.000.000	Rp. 485.447.000	81 %
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Advokasi kebijakan dan pendampingan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Rp. 600.000.000	Rp. 485.447.000	81 %
		Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang			

		keteladanan serta peran perempuan			
		Jumlah penyaluran Bakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan			
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Rp. 40.466.400	Rp. 39.019.619	96 %
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rp. 27.761.400	Rp. 27.487.619	99 %
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rp. 12.705.000	Rp. 11.532.000	91 %
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	Rp. 12705000	Rp. 11.532.000	91 %
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	Rp. 87.345.800	Rp. 78.355.000	90 %
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	Rp. 39.464.000	Rp. 35.923.300	91 %

	Kabupaten/Kota				
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan desa	Rp. 39.464.000	Rp. 35.923.300	91 %
		Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan			
	Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	Rp. 47.881.800	Rp. 42.432.500	89 %
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Rp. 47.881.800	Rp. 42.432.500	89 %
		Jumlah klien pada PUSPAGA			
10	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	Rp. 62.227.300	Rp. 44.648.621	72 %
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	Rp. 62.227.300	Rp. 44.648.621	72 %
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	Rp. 38.997.800	Rp. 28.248.900	72 %
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik			
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Rp. 23.229.500	Rp. 16.399.721	71 %

	di Kewenangan Kabupaten/Kota	yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e- Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website			
11	Program Pemenuhan Hak Anak	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	Rp. 120.534.800	Rp. 97.294.030	81 %
	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase Desa Layak Anak	Rp. 39.835.000	Rp. 36.915.000	93 %
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa Jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	Rp. 39.835.000	Rp. 36.915.000	93 %
	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Rp. 80.699.800	Rp. 60.379.030	75 %
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	Rp. 21.720.000	Rp. 19.290.000	89 %
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	Rp. 15.701.800	Rp. 14.846.800	95 %
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas	Rp. 43.278.000	Rp. 26.242.230	61 %

		Ramah Anak			
		Jumlah Ruang Laktasi			
		Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak			
12	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	Rp. 36.684.800	Rp. 29.963.177	84 %
	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Rp. 7.820.000	Rp. 4.470.000	57 %
	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	Rp. 7820000	Rp. 4.470.000	57 %
	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	Rp. 13.629.800	Rp. 12.968.177	95 %
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	Rp. 13.629.800	Rp. 11.525.000	95 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Rp. 13.235.000	Rp. 11.525.000	87 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas	Jumlah peserta sosialisasi dan			

	Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	pembentukan kader PATBM Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	Rp. 1.323.500,00	Rp. 11.525.000	87 %
13	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	Rp. 1.523.780.000	Rp. 1.521.697.100	100 %
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	Rp. 1.532.780.000	Rp. 1.521.697.100	100 %
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi	Rp. 1.532.780.000	Rp. 1.521.697.100	100 %
14	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	Rp. 2.486.763.900	Rp. 1.990.562.604	80 %
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatan	Rp. 620.389.000	Rp. 566.732.704	91 %
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Rp. 130.220.000	Rp. 61.260.000	47 %
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	Rp. 292.880.000	Rp. 165.373.600	56 %
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak	Rp. 1.384.374.900	Rp. 1.186.328.300	86 %
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	Rp. 58.900.000	Rp. 10.868.000	18 %
15	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang	Rp. 3.691.075.250	Rp. 1.413.531.712	38,30%

Hukum Adat	Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang				
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa & Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Rp. 3.691.075.250	Rp. 1.413.531.712	38%	
Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	Rp. 162.868.000	Rp. 153.637.100	94 %	
	Jumlah Kader Posyandu yang terampil				
	Jumlah LPM dibina				
	Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina				
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Rp. 58.400.000	Rp. 43.417.538	14 %	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	Rp. 58400000	Rp. 43.417.538	74 %	
	Jumlah KP-Spams di desa				
	Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan				
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	Rp. 1.000.777.250	Rp. 871.420.629	87 %	
TOTAL		Rp. 15.387.839.722	Rp. 9.864.206.623	64,10 %	

Pada Tabel TC. 29 akan memuat Reakpitulasi hasil pelaksanaan renja dan Pencapaian Renja Renstra Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan yang terdiri dari 3 urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja-PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD pada tahun (2020) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra-PD s/d Tahun 2021		Unit Kerja Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,52	64.858.900.185			76,47	4.407.321.776	76,47	2.564.781.427,00	100%	58,19%	76,47	2.564.781.427,00	99,93%	3,95%	
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100				100		100		100%		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100	532.618.049			100	21.510.000	100	13.181.000,00	100%	61%	100	13.181.000,00	100%	2%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	13	340.926.506			3	13.410.000	3	8.234.000,00	100%	61%	3	8.234.000,00	23%	2%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	191.691.543			2	8.100.000	2	4.947.000,00	100%	61%	2	4.947.000,00	17%	3%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	53.085.700.801			100%	3.116.257.880	100%	1.675.430.258,00	100%	54%	100%	1.675.430.258,00	100%	3,16%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	52.648.381.888			100%	3.116.257.880	100%	1.675.430.258,00	100%	54%	100%	1.675.430.258,00	100%	3%	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.164.396.310		100	23.850.000	100	17.378.000,00	100%	73%	100	17.378.000,00	100%	1,49%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103	599.408.900		3	23.850.000	3	17.378.000,00	100%	73%	3	17.378.000,00	3%	3%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	3.014.968.183		100	462.473.700	100	403.736.984,00	100%	87%	100	403.736.984,00	100%	13,39%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100	103.101.256		100	10.731.100	100	7.641.100,00	100%	73%	100	7.641.100,00	100%	7%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100	356.390.478		100	83.000.000	100	82.816.000,00	100%	87%	100	82.816.000,00	100%	23%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	535	239.622.244		35	35.138.500	35	35.009.200,00	100%	71%	35	35.009.200,00	7%	15%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2560	61.781.280		160	5.400.000	100	2.600.000,00	100%	100%	100	2.600.000,00	4%	4%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	2.254.072.926		100	328.204.100	100	275.670.684,00	100%	100%	100	275.670.684,00	100%	12%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	1	30.000.000		1	30.000.000	1	26.070.000,00	100%	87%	1	26.070.000,00	1	87%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	1	30.000.000		1	30.000.000	1	26.070.000,00	100%	87%	1	26.070.000,00	100%	87%	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64	5.766.531.191			4	554.067.172	4	264.224.812,00	100%	48%	4	264.224.812,00	6%	5%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	100%	5.785.745			100%	500.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	2.283.684.772			100	225.768.052	100	54.290.712,00	100%	24%	100	54.290.712,00	100%	2%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64	3.477.060.674			4	327.799.120	4	209.934.100,00	100%	64%	4	209.934.100,00	6%	6%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64	1.294.685.652			4	199.163.024	4	164.760.373,00	100%	83%	4	164.760.373,00	6%	13%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	100%	1.095.522.628			0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100	1.294.685.652			100	199.163.024	100	164.760.373,00	100%	83%	100	164.760.373,00	100%	13%	

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90	2.820.474.511		75	390.646.900	66	301.473.930,00	88%	77%	66	301.473.930,00	73%	11%	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	770	188.529.650		110	3.000.000	80	3.000.000,00	73%	100%	80	3.000.000,00	10%	2%	
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	5	132.207.100		1	3.000.000	1	3.000.000,00	100%	100%	1	3.000.000,00	20%	2%	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	460	56.322.550		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	10	32.213.679		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	10	32.213.679		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	6064	2.599.731.183		6000	387.646.900	14.495	298.473.930,00	242%	77%	14495	298.473.930,00	239%	11%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	40	455.453.415		40	148.292.900	42	131.312.930,00	105%	89%	42	131.312.930,00	105%	29%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	8	512.873.043		8	43.910.000	8	26.930.000,00	100%	61%	8	26.930.000,00	100%	5%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	9336	1.531.787.593		10.137	175.994.000	9.559	128.765.000,00	94%	73%	9559	128.765.000,00	102%	8%	
	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	3757		3.716	3.648		98%		3648		97%				
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	12	99.617.133		6	19.450.000	8	11.466.000,00	133%	59%	8	11.466.000,00	67%	12%	

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100	2.979.951.777		100	38.050.000	72	24.830.000,00	72%	65%	72	24.830.000,00	72%	1%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4050	2.979.951.777		50	38.050.000	36	24.830.000,00	72%	65%	36	24.830.000,00	1%	1%	
Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3000	1.194.725.196		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	925	961.186.887		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	154	206.942.409		19	10.900.000	10	6.780.000,00	53%	62%	10	6.780.000,00	6%	3%	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	60	15.996.100		10	4.250.000	0	-			0	-	0%	0%	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	117	601.101.185		17	22.900.000	19	18.050.000,00	112%	79%	19	18.050.000,00	16%	3%	
	Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	44		4	8		-	200%	8		-	18%			

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	75	27.543.645.563			65	1.630.617.796	41,43	1.063.144.603,00	64%	65%	41,43	1.063.144.603,00	55%	4%	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	17089	27.543.645.563			12.065	1.630.617.796	13.275	1.063.144.603,00	110%	65%	13275	1.063.144.603,00	78%	4%	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	12.000	1.074.223.127			12.000	86.728.500	13.275	64.828.000,00	111%	75%	13275	64.828.000,00	111%	6%	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	100	25.134.916.255			100	1.113.889.196	100	592.500.000,00	100%	53%	100	592.500.000,00	100%	2%	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	30	1.334.506.181			5	430.000.100	5	405.816.603,00	100%	94%	5	405.816.603,00	17%	30%	
	Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan	30		8	8	100%		8		27%						
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	2500	1.150.538.671			100	185.000.000	100	137.640.000,00	100%	74%	100	137.640.000,00	4%	12%	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	3000	1.150.538.671			500	150.000.000	26.736	102.640.000,00	5347%	68%	26736	102.640.000,00	891%	9%	
Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	3.000	1.150.538.671			500	150.000.000	26.736	102.640.000,00	5347%	68%	26736	102.640.000,00	891%	9%	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	73	622.305.000			73	35.000.000	31	35.000.000,00	42%	100%	31	35.000.000,00	42%	6%	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	72	622.305.000			72	35.000.000	31	35.000.000,00	43%	100%	31	35.000.000,00	43%	6%	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	100	234.856.750			100	29.300.000	100	20.340.000,00	100%	69%	100	20.340.000,00	100%	9%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	1	234.856.750			1	29.300.000	1	20.340.000,00	100%	69%	1	20.340.000,00	100%	9%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	1	234.856.750			1	29.300.000	1	20.340.000,00	100%	69%	1	20.340.000,00	100%	9%	

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			5.751.665.000				660.025.000		537.924.000,00				537.924.000,00		9%	
	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21,2	552.616.012			18	60.025.000	18,04	52.477.000,00	100%	87%	18,04	52.477.000,00	85%	9%	
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	76	5.199.048.989			70,77	600.000.000	70,14	485.447.000,00	99%	81%	70,14	485.447.000,00	92%	9%	
IPG (Indeks Pembangunan gender)	92,86				92,71	92,22		99%		92,22		99%				
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30	552.616.012			30	60.025.000	29	52.477.000,00	97%	87%	29	52.477.000,00	97%	9%	
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	245	474.856.830			40	60.025.000	40	52.477.000,00	100%	87%	40	52.477.000,00	16%	11%	
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	5.199.048.989			2	600.000.000	2	485.447.000,00	100%	81%	2	485.447.000,00	67%	9%	
Advokasi kebijakan dan pendampingan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3	5.100.000.000			2	600.000.000	2	485.447.000,00	100%	81%	2	485.447.000,00	67%	10%	
	Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	1100				220		220	-	100%		220	-	20%		
	Jumlah penyaluran Bakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta	52				12		12	-	100%		12	-	23%		

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	422.819.574		100	40.466.400	100	39.019.619,00	100%	96%	100	39.019.619,00	100%	9%
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	25	271.845.358		1	27.761.400	1	27.487.619,00	100%	99%	1	27.487.619,00	4%	10%
Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1578	271.845.358		90	27.761.400	90	27.487.619,00	100%	99%	90	27.487.619,00	6%	10%
Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2	150.974.216		2	12.705.000	2	11.532.000,00	100%	91%	2	11.532.000,00	100%	8%
Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	100	150.974.216		100	12.705.000	100	11.532.000,00	100%	91%	100	11.532.000,00	100%	8%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	13,86%	992.308.035		17,86	87.345.800	21,46	78.355.800,00	79,84%	90%	21,46	78.355.800,00	-15283%	8%
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	65	596.392.300		60	39.464.000	71,85	35.923.300,00	120%	91%	71,85	35.923.300,00	111%	6%
Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan desa	50	596.392.300		10	39.464.000	10	35.923.300,00	100%	91%	10	35.923.300,00	20%	6%
	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	75		10	10		100%		10		13%			
Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	86	395.915.735		75	47.881.800	92,21	42.432.500,00	123%	89%	92,21	42.432.500,00	107%	11%
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	2160	395.915.735		280	47.881.800	280	42.432.500,00	100%	89%	280	42.432.500,00	13%	11%
	Jumlah klien pada PUSPAGA	1000		200	242		121%		242		24%			

Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100	616.907.507		100	62.227.300	100	44.648.621,00	100%	72%	100	44.648.621,00	100%	7%	
Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	5	616.907.507		1	62.227.300	1	44.648.621,00	100%	72%	1,00	44.648.621,00	20%	7%	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	122	408.500.741		122	38.997.800	122	28.248.900,00	100%	72%	122	28.248.900,00	100%	7%	
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	1		1	1		100%		1		100%				
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	60	208.406.767		12	23.229.500	12	16.399.721,00	100%	71%	12	16.399.721,00	20%	8%	
Pemenuhan Hak Anak	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	68,50%	288.719.855		0	120.534.800	0	97.294.030,00	#DIV/0!	81%	0	97.294.030,00	0%	34%	
Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase Desa Layak Anak	20	133.474.011		1	39.835.000	1	36.915.000,00	100%	93%	1	36.915.000,00	5%	28%	
	Desa	32		2	2		100%		2		6%				
Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	1440	468.298.826		60	39.835.000	60	36.915.000,00	100%	93%	60	36.915.000,00	4%	8%	
	Jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	48		48	48		100%		48		100%				

Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100	734.406.579		100	80.699.800	100	60.379.030,00	100%	75%	100,00	60.379.030,00	100%	8%	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	32	334.636.104		3	21.720.000	3	19.290.000,00	100%	89%	3	19.290.000,00	9%	6%	
Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	8	158.769.298		1	15.701.800	1	14.846.800,00	100%	95%	1	14.846.800,00	13%	9%	
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	175	127.093.372		35	43.278.000	35	26.242.230,00	100%	61%	35	26.242.230,00	20%	21%	
	Jumlah Ruang Laktasi	15		1	1		100%		1		7%				
	Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak	12		12	12		100%		12		100%				
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100	623.039.862		100	34.684.800	100	28.963.177,00	100%	84%	100	28.963.177,00	100%	5%	
Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	13	92.302.610		1	7.820.000	1	4.470.000,00	100%	57%	1,00	4.470.000,00	8%	5%	
Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	650	87.371.610		50	7.820.000	35	4.470.000,00	70%	57%	35	4.470.000,00	5%	5%	

Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	82	276.589.741			78	13.629.800	79,96	12.968.177,00	103%	95%	79,96	12.968.177,00	98%	5%
Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	100	235.089.741			100	13.629.800	100	12.968.177,00	100%	95%	100	12.968.177,00	100%	6%
Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	6.000.000			0	-	0	-			0	-	0%	0%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4	254.147.511			4	13.235.000	4	11.525.000,00	100%	87%	4,00	11.525.000,00	100%	5%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	345	240.647.511			40	13.235.000	40	11.525.000,00	100%	87%	40	11.525.000,00	12%	5%
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	5	3.071.060.300			1	1.523.780.000	1	1.521.697.100,00	100%	100%	1	1.521.697.100,00	20%	50%
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	22	3.071.060.300			1	1.523.780.000	1	1.521.697.100,00	100%	100%	1,00	1.521.697.100,00	5%	50%
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi	9	1.998.780.000			1	1.523.780.000	1	1.521.697.100,00	100%	100%	1	1.521.697.100,00	11%	76%

Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100	26.886.719.900			75	2.486.763.900	75	1.990.562.604,00	100%	80%	75	1.990.562.604,00	75%	7%	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	924	26.886.719.900			154	2.486.763.900	154	1.990.562.604,00	100%	80%	154,00	1.990.562.604,00	17%	7%	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatan	100	8.381.989.000			90	620.389.000	100	566.732.704,00	111%	91%	100	566.732.704,00	100%	7%	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	154	1.087.725.000			154	130.220.000	0	61.260.000,00	0%	47%	0	61.260.000,00	0%	6%	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	95%	3.457.740.000			70%	292.880.000	0	165.373.600,00	0%	56%	0	165.373.600,00	0%	5%	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak	154	10.105.374.900			19	1.384.374.900	19	1.186.328.300,00	100%	86%	19	1.186.328.300,00	12%	12%	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	100	1.123.670.000			50	58.900.000	75	10.868.000,00	150%	18%	75	10.868.000,00	75%	1%	

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	70	32.492.289.450		45	3.691.075.250	42,21	1.413.531.712,00	94%	38%	42,21	1.413.531.712,00	60%	4%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	60	32.492.289.450		10	3.691.075.250	4	1.413.531.712,00	40%	38%	4,00	1.413.531.712,00	7%	4%
Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	156	836.688.000		40	162.868.000	24	153.637.100,00	60%	94%	24	153.637.100,00	15%	18%
	Jumlah Kader Posyandu yang terampil	848		48	48		100%		48		6%			
	Jumlah LPM dibina	8		8	8		100%		8		100%			
	Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	164		164	164		100%		164		100%			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	112	22.582.400.500		42	2.469.030.000	46	345.056.445,00	110%	14%	46	345.056.445,00	41%	2%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	60	744.200.000		35	58.400.000	35	43.417.538,00	100%	74%	35	43.417.538,00	58%	6%
	Jumlah KP-Spams di desa	140		140	140		100%		140		100%			
	Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan	18		3	10		333%		10		56%			
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165	7.929.000.950		165	1.000.777.250	165	871.420.629,00	100%	87%	165	871.420.629,00	100%	11%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan Mewujudkan misi ke 5 Kepala Daerah yakni “ Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan Kondusif”. Dalam mewujudkan misi tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai sasaran yaitu : Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dengan Indikator adalah Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Sasaran selanjutnya Meningkatnya kesetaraan gender dengan Indikator adalah IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), dan Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD, Selanjutnya Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan Indikator adalah Rasioa Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dan Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak), dan sasaran yang lain ialah Meningkatkan klasifikasi desa dengan indikator adalah persentase desa dengan klasifikasi minimal maju.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi	Proyeksi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani			46,95%	52,95%	58,95%	64,95%	70,95%	76,95%	54,91%	52,95%
2	IPG (Indeks Pembangunan Gender)			92,71	92,74	92,77	92,8	92,83	92,86	92,22	92,74
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			70,77	72	73,02	74,04	75	76	70,14	72
	Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) Pada Belanja Langsung APBD			18	21	21,05	21,1	21,15	21,2	18,01%	21
	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			14,1	14	13,9	13,8	13,7	13,6	17,6	14
	Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000			2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	3,17	1,9

	anak)										
3	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju			16,88	23,38	28,57	33,77	38,96	44,16	16,88%	23,38

Urusan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan (jasmani, rohani, dan sosial). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada 26 (dua puluh enam) jenis PPKS namun yang tertangani di Kabupaten Balangan hanya 12 Jenis PPKS berjumlah 96.059 orang yang terdiri dari Anak terlantar berjumlah 177 orang, Anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 24 orang, Lanjut usia 4.442 orang, Penyandang Disabilitas berjumlah 1.240 Orang, Gelandangan berjumlah 23 Orang, Pengemis berjumlah 19 Orang. Korban Penyalahgunaan NAPZA berjumlah 44 orang, Korban Bencana Alam berjumlah 26.736 orang, Korban Bencana Sosial berjumlah 54 Orang, Perempuan rawan sosial ekonomi berjumlah 1.079 orang, fakir miskin berjumlah 60.656 orang, dan Komunitas Adat Terpencil berjumlah 1.565 orang.

Indikator angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani pada tahun 2021 menargetkan 46,95% dengan realisasi 54,91% dan capaian 116,95%. Pencapaian ini dikategorikan sangat tinggi tingkat keberhasilannya. Tahun 2021 jumlah PPKS sebanyak 96.059 PPKS dan jumlah PPKS yang terlanyi atau terbantunya sebanyak 52.749 atau 54,91% sebagai berikut:

- a. Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh namun di Kabupaten Balangan Anak terlantar berjumlah 177 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orang tuannya atau keluarganya, Tahun

2021 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan sebanyak 19 orang dikirim untuk mengikuti pendidikan pelatihan keterampilan melalui Panti Sosial Bina remaja (PSBR) atau dengan capaian 10,73 %.

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum di Kabupaten Balangan berjumlah 24 orang dan didampingi oleh Dinas Sosial untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut berupa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dan penggunaan narkoba.
- c. Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di Kabupaten Balangan Lanjut usia terlantar berjumlah 4.442 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan berupa pemberian kebutuhan dasar berupa sembako kepada 400 orang, mendapatkan bantuan alat kebutuhan dasar berupa alat bantu lansia sebanyak 13 orang dan bantuan uang saku dalam Panti jompo sebanyak 2 orang dari anggaran APBD Kabupaten. Sedangkan bantuan sarana Prasarana kamar lansia sebanyak 200 orang dari Kementrian Sosial, jadi jumlah Lansia yang mendapatkan bantuan berjumlah 618 orang atau 13,91 % dari jumlah lansia ini sifanya hanya bantuan konsuntif saja.
- d. Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak atau norma di Kabupaten Balangan berjumlah 1.240 orang, yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, P3A dan PMD dari Kabupaten Balangan sebanyak 33 orang yang diberikan alat bantu terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kruk dan tongkat netra dari Dana APBD, Disabilitas yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial pada tahun 2021 sebanyak 33 orang atau 2,26 %.

- e. Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor dan puting beliung dikabupaten Balangan pada tahun 2021 berjumlah 8.401 Kepala Keluarga dengan 26.736 jiwa dan semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan berupa kebutuhan pokok sehari – hari.
- f. Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 15 Kepala keluarga dengan 54 jiwa semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas sosial Kabupaten Balangan.
- g. Perempuan rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalani kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya, di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 1.079 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan sebanyak 8 orang diberikan kepada Perempuan rawan social ekonomi yang mendapatkan pelayanan sebanyak 8 orang atau 0,74 %.
- h. Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fakir miskin di Kabupaten Balangan berjumlah 60.656 jiwa atau 20.904 Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dari dinas sosial pada Tahun 2021 berupa sebanyak 5.322 jiwa mendapatkan Sembako, 14.280 jiwa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan 4.327 jiwa mendapatkan Bantuan sembako/ BPNT PPKM kepada keluarga Fakir Miskin yang terdampak Pandemi Covid 19 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Dana APBN). Sedangkan dari dana APBD 8 kepala keluarga mendapatkan Bantuan Rehab Rumah yang sifatnya menunjang kehidupan orang atau keluarga agar bisa menjalani kehidupan yang layak, sedangkan sifatnya meningkatkan produktifitas, pemberian

Bantuan Usaha Kelompok Bersama (KUBe) sebanyak 5 kelompok atau sebanyak 50 kepala keluarga dari APBD II dan 1 kelompok dari APBN, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Fakir Miskin sebanyak 40 Kepala Keluarga dari APBD dan 3 Kepala Keluarga dari APBN berupa tambahan modal usaha berupa barang dan Santunan kematian yang diberikan kepada fakir miskin sebanyak 1.180 jiwa berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- dengan demikian Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan dari Dinas Sosial pada Tahun 2021 sebanyak 25.127 jiwa atau 41,43 %.

- i. Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, di Kabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong yaitu Desa Mamigang yang berjumlah sekitar 1.565 jiwa Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu berupa pembinaan keterampilan kepada warga komunitas adat terpencil pada tahun 2021 kepada sebanyak 80 Kepala keluarga atau 5,11 %.

Capaian yang sangat tinggi ini karena pada tahun 2021 menyalurkan bantuan bantuan yang rutin dilaksanakan dan bantuan sembako / BPNT PPKM kepada keluarga Fakir Miskin yang terdampak Pandemi Covid 19 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Dana APBN). Sedangkan bantuan dari APBD II untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa sembako lansia, alat bantu lansia, alat bantu disabilitas, bantuan ekonomi prduktif untuk wanita rawaan sosial ekonomi, bantuan santunan kematian, Kelompok usaha bersama (KUBe), bantuan rehabilitasi sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni dan Usaha ekonomi produktif (UEP).

Namun dalam hal ini pelayanan yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum maksimal dikarenakan tidak seimbangya tenaga PSKS dan/atau ASN yang menangani PPKS dengan jumlah PPKS di Balangan, program dan kegiatan yang ada pada

sifatnya hanya memberikan untuk kebutuhan hidup (konsumtif) dan program yang sifatnya untuk meningkatkan produktifitas masih relatif kecil karena keterbatasan anggaran yang diberikan.

Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja kedepannya adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) agar lebih mantap dalam melaksanakan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), memprioritaskan program dan kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan produktifitas supaya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa mandiri. dan berkoordinasi dengan Dinas/instansi lain terkait pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna mencapai sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Capaian indeks pembangunan gender kabupaten Balangan pada tahun 2021, menggunakan realisasi capaian IPG tahun 2020, capaian IPG pada tahun 2020 sebesar 99,39% sedangkan target pada tahun 2021 adalah sebesar 92,71 dengan memakai realisasi tahun 2020 sebesar 92,22 sehingga

diperoleh capaian untuk tahun 2021 adalah sebesar 99,47%. Maka ada peningkatan sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan pencapaian IPG provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 103,78%. Realisasi IPG provinsi Kalimantan Selatan sebesar 88,86 sedangkan realisasi IPG kabupaten Balangan sebesar 92,22 yang berarti kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di kabupaten Balangan masih terdapat kesenjangan, sehingga diperlukan kiat-kiat ataupun tindakan yang nyata untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dikarenakan adanya legitimasi konstruksi budaya di masyarakat yang cenderung patriaki, dimana ada pandangan bahwa laki-laki lebih dalam segala hal dibandingkan perempuan. Kesenjangan juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan interpretasi ajaran agama dan adanya kebijakan politik, yang merugikan gender tertentu.

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan. IDG ini digunakan untuk mengukur persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Indeks pemberdayaan gender kabupaten Balangan pada tahun 2021, menggunakan realisasi capaian IDG tahun 2020, capaian IDG pada tahun 2020 sebesar 106,01% sedangkan target pada tahun 2021 adalah sebesar 65,64 dengan memakai realisasi tahun 2020 sebesar 70,14 sehingga diperoleh capaian untuk tahun 2021 adalah sebesar 106,86 %. Maka ada

peningkatan sebesar 0,85% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan politik semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibandingkan tahun sebelumnya. Program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender perlu terus didorong guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya dapat diselenggarakan secara lebih setara, contohnya berdasarkan hasil pemilu 2019-2024, persentase anggota parlemen perempuan di Provinsi Kalimantan selatan hanya 16,36%, bahkan untuk kabupaten Balangan hanya sebesar 16% keterwakilan perempuan di parlemen.

Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG's. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD kabupaten pada tahun 2021 adalah sebesar 18,01% dengan capaian 100% dan dikategorikan sangat tinggi. Hal ini mendapat dukungan dari 29 SKPD dan hanya 1 SKPD yang tidak melaksanakan PPRG dengan jumlah program yang responsive gender sebanyak 82 program dan 97 kegiatan. Persentase ARG didapatkan dari anggaran yang responsive gender sebesar Rp 94.411.035.006 dibagi dengan total belanja barang dan jasa ditambah belanja modal APBD Kab. Balangan sebesar Rp 523.329.214.514,-.

Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender

disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk mengedepankan dan memperkuat peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Balangan dalam meningkatkan indeks pembangunan, pemberdayaan gender dan ARG
2. Adanya kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desakabupaten Balangan dengan Instansi/SKPD terkait.
3. Adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.

Permasalahan/hambatan

1. Masih adanya budaya patriaki yang dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga menghambat/menciptakan kesenjangan gender di tengah masyarakat.
2. Kerjasama lintas sektor yang belum optimal.
3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang responsive gender.
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan PUG di SKPD Kabupaten
5. Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Telah terjadi peningkatan capaian rasio kekerasan terhadap perempuan yang seharusnya mengalami penurunan yaitu sebesar 12,05%, capaian rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 sebesar 87,23% sedangkan target pada tahun 2021 adalah sebesar 14,1 dengan realisasi sebesar 17,6 sehingga diperoleh capaian untuk tahun 2021 hanya sebesar 75,18 % dengan kategori sedang. Sedangkan capaian pada rasio kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 134,64% dari capaian tahun sebelumnya sebesar 176,14%, sedangkan target pada tahun 2021 adalah sebesar 2 dengan realisasi sebesar

3,17 sehingga diperoleh capaian untuk tahun 2021 sebesar 41,50 % dengan kategori sangat rendah.

Hal itu terjadi karena adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 24 anak yang terdiri dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Dari anak yang didampingi terdiri dari 13 korban kekerasan dan 11 anak sebagai pelaku. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 8 orang yang terdiri dari 6 kasus KDRT, 1 kasus kekerasan psikis dan 1 kekerasan seksual.

Setiap tahun kekerasan yang dialami perempuan dan anak cenderung marak dan sangat mencemaskan, padahal pemerintah dan masyarakat sipil telah berjuang keras untuk mengatasinya. Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Begitupun kekerasan terhadap anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 setiap perbuatan terhadap anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,

Faktor utama penyebab merebaknya serta tak terkendalinya kekerasan yang dialami perempuan dan anak, dikarenakan selama ini terkesan pemerintah maupun masyarakat sipil melihat dan menangani ini, sebagai dua masalah yang terpisah, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, padahal ini merupakan permasalahan yang integral dan saling mempengaruhi. Dimana dapat dipastikan, jika terjadi kekerasan menimpa perempuan, kemungkinan besar di dalamnya juga terjadi kekerasan terhadap anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi terdepan yang mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Adanya kerjasama lintas sektor, sehingga jika terjadi permasalahan dapat segera tertangani dengan baik
3. Adanya kesadaran pada masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak.

Permasalahan/hambatan

1. Adanya rasa enggan/malu melaporkan atas kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwenang , karena beranggapan itu adalah aib.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk guna penguatan ekonomi desa. Indeks Desa Membangun juga didukung seiring terbentuknya Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2004 yang memberikan ruang guna terciptanya desa yang mandiri dan (Indeks Desa Membangun Kementerian Desa & Daerah Tertinggal, Kemendesa 2015). Indeks Desa Membangun memiliki sejumlah klasifikasi status desa yang mengkategorikan perkembangan pembangunan sebuah desa, di antaranya Desa Sangat Tertinggal $IDM \leq 0,4907$, Desa Tertinggal $0,4907 < IDM \leq 0,5989$, Desa Berkembang $0,5989 < IDM \leq 0,7072$, Desa Maju $0,7072 < IDM \leq 0,8155$, Desa Mandiri $IDM > 0,8155$ (Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun, Kemendesa 2019).

Desa maju meningkat dari 3 desa pada tahun 2019 menjadi 12 desa pada tahun 2020, demikian pula dengan desa berkembang meningkat dari 116 desa menjadi 127 desa, desa tertinggal dari 28 desa menjadi 14 desa. Namun pada tahun 2020 terdapat 1 desa sangat tertinggal, yaitu Desa Wonorejo. Desa ini pada tahun 2019 tidak dimasukkan dalam verifikasi IDM manual karena sudah tidak ada kegiatan apapun di desa tersebut dan dianggap sudah bergabung dengan desa Sumber Rejeki. Namun dalam verifikasi IDM 2020 via aplikasi, desa tersebut statusnya masih sebagai

desa di Kabupaten Balangan karena penghapusan dan penggabungannya belum di sahkan oleh Kemendagri.

Keberhasilan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Balangan terlihat dari kenaikan nilai IDM dari Tahun 2019 (0,6313) dengan status IDM Berkembang di tahun 2020 menjadi (0,6395) dengan status IDM Berkembang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja indikator IDM dapat disimak pada paparan berikut ini:

- a. Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mendukung capaian tersebut yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan pelatihan keterampilan manajemen BUMDES, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK, Sosialisasi Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
- b. Adanya dukungan Pemerintah Pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan pengucuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya.
- c. Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
- d. Adanya kebijakan kepala daerah untuk menyelenggarakan pendampingan kepada desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dengan dana bersumber dari APBD Kabupaten Balangan.
- e. Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai IDM dapat dilihat melalui komponen indeks komposit tersebut yaitu (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah. (3) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

- a. Peningkatan pelayanan sosial dasar seperti meningkatnya kinerja kader posyandu dalam memberikan layanan yang berdampak pada meningkatnya presentasi warga memperoleh layanan kesehatan serta BPJS.
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- c. Meningkatnya PAUD sebagai lembaga pendidikan usia dini di desa.
- d. Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi.
- e. Tersedianya akses informasi berupa layanan internet di desa.

2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

- a. Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yaitu BUMDES.
- b. Keragaman produksi masyarakat seperti UP2K, UMKM, UPPKS yang dilaksanakan oleh PKK Desa, Dinas Perindustrian koperasi UMKM, dinas perdagangan serta perusahaan.

3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

IKL menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan yang berimbas pada penurunan bencana dan penanganan bencana.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok untuk membantu kepala daerah/Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut :

Tantangan

1. Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan;
3. Pembangunan di bidang sosial dituntut untuk lebih dinamis, berkesinambungan dan ditingkatkan seiring semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
4. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.
5. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program kegiatan yang responsif gender.
6. Pemahaman terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang masih terbatas disemua tingkatan.
7. Belum optimalnya bentuk fasilitasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang berprespektif gender.
8. Masih adanya perkawinan anak di bawah umur 18 tahun
9. Belum terbentuknya UPT. PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
10. Belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa
12. Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan

13. Kurangnya desa yang menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE

Peluang

1. Adanya visi dan misi serta kebijakan dan regulasi pemerintah yang menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan referensi data yang akurat dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara konsisten serta monitoring evaluasi kegiatan merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang sosial;
3. Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;
4. Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendukung usaha kesejahteraan sosial
5. Adanya komitmen kepala daerah/Bupati kabupaten Balangan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang responsif gender.
6. Telah terbentuknya PUSPAGA yang merupakan wadah bagi calon Pengantin untuk mendapatkan konseling Pra nikah.
7. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa terpadu
8. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait berjalan dengan baik ;
9. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa;
10. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih . RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perhubungan. Secara keseluruhan, Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel TC. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel Rancangan Awal dan Hasil Analisis Kebutuhan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					Rp 17.691.405.407					Rp 18.944.823.667	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,48	Rp 10.727.170.307	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,48	Rp 12.254.818.630		
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 %				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%			
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	Rp 117.026.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	Rp 146.729.800,00		
1 06 01 2.01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 65.766.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 82.252.000,00		
1 06 01 2.01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 51.260.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 64.477.800,00		
1 06 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Rp 8.332.437.007,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Rp 8.939.473.098		
1 06 01 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Rp 8.302.437.007,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Rp 8.853.953.098,00		
1 06 01 2.02 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 56.545.000,00		
1 06 01 2.02 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp 18.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp 28.975.000,00		
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 360.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 165.000.000,00		
1 06 01 2.05 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	400 Paket	Rp 160.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	400 Paket	Rp 80.000.000,00		
1 06 01 2.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undang	40 orang	Rp 200.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	40 orang	Rp 85.000.000,00		
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 608.017.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 1.747.233.800,00		
1 06 01 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 15.727.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 9.106.300,00		
1 06 01 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 46.550.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 71.534.500,00		
1 06 01 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 34.817.300,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 65.574.400,00		
1 06 01 2.06 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 9.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 13.200.000,00		
1 06 01 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 501.322.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 1.587.818.600,00		
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp 936.622.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp 686.980.732,00		
1 06 01 2.08 006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 400.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 284.100.000,00		
1 06 01 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 536.222.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 402.880.732,00		
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp 373.067.700,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp 569.401.200,00		
1 06 01 2.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Rp 186.533.850,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Rp 250.076.100,00		
1 06 01 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp 186.533.850,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp 319.325.100,00		

1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Balangan	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	78 %	Rp	411.658.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Balangan	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	78 %	Rp	302.605.200,00
1	06	02	2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Balangan	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	110 KK	Rp	67.750.000,00	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Balangan	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	110 KK	Rp	9.750.000,00
1	06	02	2.01	001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Balangan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 KK	Rp	52.000.000,00	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Balangan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 KK	Rp	9.750.000,00
1	06	02	2.01	002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Balangan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 KK	Rp	15.750.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Balangan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 KK	Rp	-
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	2 Buah	Rp	5.480.000,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	2 Buah	Rp	-
1	06	02	2.02	001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	Rp	5.480.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen	Rp	-
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	6.054	Rp	338.428.000,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	6.054	Rp	292.855.200,00
1	06	02	2.03	001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	40 Orang	Rp	52.300.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	40 Orang	Rp	77.400.000,00
1	06	02	2.03	002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	Rp	72.223.000,00	Advokasi kebijakan dan pendampingan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Balangan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	Rp	64.650.000,00
1	06	02	2.03	003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000 KK	Rp	200.850.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000 KK	Rp	109.100.000,00
1	06	02	2.03	004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	Rp	13.055.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	Rp	41.705.200,00
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Balangan	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100,00% %	Rp	484.792.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Balangan	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100,00% %	Rp	368.028.200,00
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	800 Orang	Rp	484.792.000,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	800 Orang	Rp	368.028.200,00
1	06	04	2.01	001 Penyediaan Permakanan	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	Rp	90.040.000,00	Penyediaan Permakanan	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	Rp	98.417.500,00
1	06	04	2.01	002 Penyediaan Sandang	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp	44.450.000,00	Penyediaan Sandang	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp	45.767.600,00
1	06	04	2.01	003 Penyediaan Alat Bantu	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	Rp	77.002.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	Rp	48.924.800,00
1	06	04	2.01	005 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp	56.407.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp	33.072.900,00
1	06	04	2.01	004 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balangan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	Rp	108.250.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balangan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	Rp	77.136.800,00
1	06	04	2.01	006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Balangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	Rp	41.816.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Balangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	Rp	11.214.900,00
1	06	04	2.01	009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp	66.827.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp	53.493.700,00

1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Balangan	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	67% %	Rp 5.680.450.600,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Balangan	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	67% %	Rp 5.474.881.837,00	
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	12.065 KK	Rp 5.680.450.600,00		Balangan	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	12.065 KK	Rp 5.474.881.837,00	
1	06	05	2.02	002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12.000 KK	Rp 268.140.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12.000 KK	Rp 446.050.000
1	06	05	2.02	003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balangan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 KK	Rp 4.158.301.000,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balangan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 KK	Rp 4.197.125.737
1	06	05	2.02	004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balangan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 1.254.009.600,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balangan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 831.706.100
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Balangan	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100% %	Rp 360.235.500,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Balangan	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100% %	Rp 517.139.600,00	
1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	500 KK	Rp 210.235.500,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	500 KK	Rp 252.910.800,00	
1	06	06	2.01	001	Penyediaan Makanan	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Rp 210.235.500,00	Penyediaan Makanan	Balangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Rp 252.910.800,00
1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	31 Orang	Rp 150.000.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	31 Orang	Rp 264.228.800,00	
1	06	06	2.02	002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balangan	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	31 Orang	Rp 150.000.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balangan	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	31 Orang	Rp 264.228.800,00
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Balangan	Persentase makam yang terawat	100% %	Rp 27.099.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Balangan	Persentase makam yang terawat	100% %	Rp 27.350.200,00	
1	06	07	15	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	1 Buah	Rp 27.099.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	1 Buah	Rp 27.350.200,00	
1	06	07	2.01	002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Rp 27.099.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Rp 27.350.200,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Rp 1.146.286.000													
Rp 1.244.572.500													
2	08				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Balangan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21,00 %	648.434.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21,00 %	859.542.600
							IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	72			IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	72	
							IPG (Indeks Pembangunan gender)	92,74			IPG (Indeks Pembangunan gender)	92,74	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Balangan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30 Lembaga Pemerintah	80.770.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30 Lembaga Pemerintah	100.733.400
2	08	02	2.01	002	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 10.190.000,00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.636.400
2	08	02	2.01	003	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Balangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	Rp 70.580.000,00	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	79.097.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	3 Organisasi	567.664.000	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	3 Organisasi	758.809.200
2	08	02	2.02	001	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 23.510.000,00	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dokumen	-
2	08	02	2.02	002	Advokasi kebijakan dan pendampingan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	Rp 544.154.000,00	Advokasi kebijakan dan pendampingan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 Organisasi	758.809.200
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Balangan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	50.406.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	24.324.800
2	08	03	2.01		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Balangan	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan thhadap perempuan	4 desa	36.511.000	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan thhadap perempuan	4 desa	-
2	08	03	2.01	002	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	Rp 36.511.000,00	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	-
2	08	03	2.02		Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasanyang mmeerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Balangan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2 lembaga	13.895.000	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasanyang mmeerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2 lembaga	24.324.800
2	08	03	2.02	001	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Rp 13.895.000,00	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	3 Orang	24.324.800
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Balangan	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	17,26 %	135.589.800	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	17,26 %	105.536.300
2	08	04	2.01		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	61 %	78.579.800	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	61 %	71.913.100
2	08	04	2.01	003	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Balangan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 78.579.800,00	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.913.100
2	08	04	2.03		Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	77 %	57.010.000	Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	77 %	33.623.200
2	08	04	2.03	001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	Rp 57.010.000,00	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	33.623.200

2	08	05		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Balangan	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100 %	74.672.200	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Balangan	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100 %	59.362.400
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	1 dokumen	74.672.200	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	1 dokumen	59.362.400
2	08	05	2.01	001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Balangan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Rp 43.302.200,00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	34.299.200
2	08	05	2.01	002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 31.370.000,00	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.063.200
2	08	06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Balangan	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	68	140.389.000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Balangan	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	68	120.939.200
2	08	06	2.01	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Persentase Desa Layak Anak	4 % 5 desa	72.459.950	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Persentase Desa Layak Anak	4 % 5 desa	62.546.400
2	08	06	2.01	001 Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	Rp 57.268.000,00	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	62.546.400
2	08	06	2.01	002 Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 15.191.950,00	Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100 %	67.929.050	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100 %	58.392.800
2	08	06	2.02	001 Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	314 Anak	Rp -	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Anak	-
2	08	06	2.02	002 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 21.910.000,00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.976.800
2	08	06	2.02	003 Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Balangan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	2 Dokumen	Rp 14.696.900,00	Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Balangan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	0 Dokumen	-
2	08	06	2.02	004 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 31.322.150,00	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.416.000
2	08	07		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Balangan	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100 %	96.795.000	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Balangan	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100 %	74.867.200
2	08	07	2.01	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Balangan	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	2 buah	22.570.000	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Balangan	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	2 buah	9.896.400
2	08	07	2.01	001 Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Dae	Rp 22.570.000,00	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Dae	9.896.400
2	08	07	2.02	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Balangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	78 indeks	51.665.000	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Balangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	78 indeks	54.844.400
2	08	07	2.02	001 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Rp 51.665.000,00	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	54.844.400
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 lembaga	22.560.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 lembaga	10.126.400
2	08	07	2.03	002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 22.560.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.126.400

2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Rp	6.484.916.200				Rp	12.884.038.400	
2	13	03		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Balangan	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	1 Kerjasama	202.918.300	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Balangan	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	1 Kerjasama	4.088.559.000
2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Balangan	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	1 Kerjasama	202.918.300	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Balangan	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	1 Kerjasama	4.088.559.000
2	13	03	2.01	003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan	1 Dokumen	202.918.300	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan	1 Dokumen	4.088.559.000
2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	80 %	2.332.385.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	80 %	4.442.834.500
2	13	04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pedes	154 Orang	2.332.385.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pedes	154 Orang	4.442.834.500
2	13	04	2.01	001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi	1 Dokumen	1.552.320.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi	1 Dokumen	1.591.128.000,00
2	13	04	2.01	002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	27.705.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	27.623.200,00
2	13	04	2.01	003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	140.670.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	174.849.600,00
2	13	04	2.01	004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	414.860.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	395.953.200,00
2	13	04	2.01	006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	154 Laporan	73.360.000,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	- Laporan	-
2	13	04	2.01	009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1.541.832.900,00
2	13	04	2.01	010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	148.516.400,00
2	13	04	2.01	013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	54.770.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	34.584.800,00
2	13	04	2.01	015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	154 desa		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	154 desa	505.346.400,00
2	13	04	2.01	018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen	68.700.000,00	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen	23.000.000,00
2	13	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	50%	3.949.612.900	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	50%	4.352.644.900
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	10 Desa	3.949.612.900	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	10 Desa	4.352.644.900,00
2	13	05	2.01	003 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Balangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	2.032.351.000	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	758.274.300,00
2	13	05	2.01	005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	156.024.200	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1.992.284.300,00
2	13	05	2.01	006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	263.800.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	88.449.800,00
2	13	05	2.01	009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	165 Dokumen	1.497.437.700	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	165 Dokumen	1.513.636.500,00

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Program Perlindungan Jaminan Sosial/Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Balangan	Jumlah bantuan bahan untuk kelompok usaha bersama	15 Paket	Musrenbang
2	Program Perlindungan Jaminan Sosial/Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Balangan	Jumlah rehab rumah tidak layak huni	15 Buah	Musrenbang
3	Program Perlindungan Jaminan Sosial/Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Panaitan, Kecamatan Lampihong	Jumlah bantuan bahan untuk kelompok usaha bersama	1 Paket	Pokir Dewan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku kepentingan.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). RPJM I (2005-2010) yaitu menata Kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJMN II (2010-2015) yaitu memantapkan penataan Kembali Indonesia di segala bidang dengan meningkatkan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN III (2015-2019) yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN IV (2020-2024) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya bersaing.

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN IV (2020-2024) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya bersaing.

Arah kebijakan dari Kementerian Sosial antara lain:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik
5. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
6. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
7. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
8. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Arah kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Penurunan pekerja anak
5. Pencegahan perkawinan anak

Arah kebijakan dari Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas intra dan antar pedesaan
2. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul
3. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital
5. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.
7. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.

Mengacu pada arah kebijakan dari 3 urusan tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dalam urusan hal pelayanan dasar dan pelayanan non dasar. Oleh sebab itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Dasar Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang dimana pelayanan dasar tersebut meliputi Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai adalah “Membangun Desa, Menata Kota”. Untuk Mencapai Visi Kabupaten Balangan, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Mengacu pada visi dan misi terkait Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah di bentuk untuk melaksanakan urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa mendukung misi ke-5 yaitu *Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif*.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan

visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan adalah:

NO	TUJUAN
1	Meningkatnya Kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
2	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
3	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa yang baik

b. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi rujukan dan sasaran kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya Kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan Social (PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	58,95 %
2	Meningkatnya kesetaraan gender pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kesetaraan Gender	IPG(Indeks Pembangunan Gender)	92,77
			IDG(Indeks Pemberdayaan Gender)	73,02
			Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender)pada belanja	21,05

			langsung APBD	
		Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13,9
			Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	1,8
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Meningkatnya klasifikasi desa	Persentase desa dengan klasifikasi minimal maju	28,57

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) teratngani	Meningkatnya produktifitas pemerlu pelayanan kesejahteraan Social (PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	46,95%	52,95%	58,95%	64,95%	70,95%	76,95%
3	Meningkatnya kesetaraan gender pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IPG (Indeks Pembangunan	Meningkatnya kesetaraan Gender	IPG(Indeks Pembangunan Gender)	92,71	92,74%	92,77	92,8	92,83	92,86
				IDG(Indeks Pemberdayaan Gender)	70,77	72	73,02	74,04	75	76
				Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender)pada belanja langsung	18	21	21,05	21,1	21,15	21,2

		Gender)		APBD						
			Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,1	14	13,9	13,8	13,7	13,6
				Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Perkembangan status pembangunan desa dari sangat tertinggal, berkembang, menuju maju, dan mandiri	Meningkatnya klasifikasi desa	Persentase desa dengan klasifikasi minimal maju	16,88	23,38	28,57	33,77	38,96	44,16

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut, ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Balangan
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah serta pencapaian IKU Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan

dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk Tahun 2023 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2023 mencakup 15 Program terdiri dari 27 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan Rencana anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 33.073.434.567,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang berasal dari APBD. Secara rinci Rencana program dan kegiatan tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan meliputi:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Sub Kegiatan:
 1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
- b. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Alat Bantu
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
7. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Masyarakat
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Makanan
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

8. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
10. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

12. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

13. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

- a. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

14. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 7. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 8. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 9. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
15. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Renja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Balangan
Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Balangan	76,48	Rp 12.254.818.630		76,48	Rp 13.480.300.493
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		100 %			100 %	
1 06 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	Balangan	100 %	Rp 146.729.800		100 %	Rp 161.402.780
1 06 01	2.01	001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	2 Dokumen	Rp 82.252.000		2 Dokumen	Rp 90.477.200
1 06 01	2.01	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	2 Dokumen	Rp 64.477.800		2 Dokumen	Rp 70.925.580
1 06 01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Balangan	100 %	Rp 8.939.473.098		100 %	Rp 9.833.420.408
1 06 01	2.02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	60 Orang/bulan	Rp 8.853.953.098		60 Orang/bulan	Rp 9.739.348.408
1 06 01	2.02	005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	2 Laporan	Rp 56.545.000		2 Laporan	Rp 62.199.500
1 06 01	2.02	007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balangan	2 Laporan	Rp 28.975.000		2 Laporan	Rp 31.872.500
1 06 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	100 %	Rp 165.000.000		100 %	Rp 181.500.000
1 06 01	2.05	002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balangan	400 Paket	Rp 80.000.000		400 Paket	Rp 88.000.000
1 06 01	2.05	011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undang	Balangan	40 orang	Rp 85.000.000		40 orang	Rp 93.500.000
1 06 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Balangan	100 %	Rp 1.747.233.800		100 %	Rp 1.921.957.180
1 06 01	2.06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 9.106.300		1 Paket	Rp 10.016.930
1 06 01	2.06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 71.534.500		1 Paket	Rp 78.687.950
1 06 01	2.06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan kantor yang disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 65.574.400		1 Paket	Rp 72.131.840
1 06 01	2.06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Balangan	3 Dokumen	Rp 13.200.000		3 Dokumen	Rp 14.520.000
1 06 01	2.06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	12 Laporan	Rp 1.587.818.600		12 Laporan	Rp 1.746.600.460
1 06 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	12 Bulan	Rp 686.980.732		12 Bulan	Rp 755.678.805
1 06 01	2.08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 284.100.000		1 Laporan	Rp 312.510.000
1 06 01	2.08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balangan	12 Laporan	Rp 402.880.732		12 Laporan	Rp 443.168.805
1 06 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	12 Bulan	Rp 569.401.200		12 Bulan	Rp 626.341.320
1 06 01	2.09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Balangan	2 Unit	Rp 250.076.100		2 Unit	Rp 275.083.710
1 06 01	2.09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Balangan	7 Unit	Rp 319.325.100		7 Unit	Rp 351.257.610

1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Balangan	78 %	Rp 302.605.200			78 %	Rp 332.865.720
1	06	02	2.01	<i>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</i>	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	Balangan	110 KK	Rp 9.750.000			110 KK	Rp 10.725.000
1	06	02	2.01	001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	30 KK	Rp 9.750.000		30 KK	Rp 10.725.000
1	06	02	2.01	002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	80 KK	Rp -		80 KK	Rp -
1	06	02	2.02		<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	Balangan	2 Buah	Rp -		2 Buah	Rp -
1	06	02	2.02	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balangan	1 Dokumen	Rp -		1 Dokumen	Rp -
1	06	02	2.03		<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	Balangan	6.054	Rp 292.855.200		6.054	Rp 322.140.720
1	06	02	2.03	001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Balangan	40 Orang	Rp 77.400.000		40 Orang	Rp 85.140.000
1	06	02	2.03	002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	8 Orang	Rp 64.650.000		8 Orang	Rp 71.115.000
1	06	02	2.03	003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	6.000 KK	Rp 109.100.000		6.000 KK	Rp 120.010.000
1	06	02	2.03	004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	9 Lembaga	Rp 41.705.200		9 Lembaga	Rp 45.875.720
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial</i>	Balangan	100,00% %	Rp 368.028.200			100,00% %	Rp 404.831.020
1	06	04	2.01		<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balangan	800 Orang	Rp 368.028.200		800 Orang	Rp 404.831.020
1	06	04	2.01	001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	350 Orang	Rp 98.417.500		350 Orang	Rp 108.259.250
1	06	04	2.01	002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	10 Orang	Rp 45.767.600		10 Orang	Rp 50.344.360
1	06	04	2.01	003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	16 Orang	Rp 48.924.800		16 Orang	Rp 53.817.280
1	06	04	2.01	005	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	10 Orang	Rp 33.072.900		10 Orang	Rp 36.380.190
1	06	04	2.01	004	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	63 Orang	Rp 77.136.800		63 Orang	Rp 84.850.480
1	06	04	2.01	006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	23 Orang	Rp 11.214.900		23 Orang	Rp 12.336.390
1	06	04	2.01	009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	10 Orang	Rp 53.493.700		10 Orang	Rp 58.843.070

1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Balangan	67% %	Rp 5.474.881.837			67% %	Rp 6.022.370.021
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	Balangan	12.065 KK	Rp 5.474.881.837			12.065 KK	Rp 6.022.370.021
1	06	05	2.02	002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Balangan	12.000 KK	Rp 446.050.000			12.000 KK	Rp 490.655.000
1	06	05	2.02	003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	12000 KK	Rp 4.197.125.737			12000 KK	Rp 4.616.838.311
1	06	05	2.02	004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	50 Orang	Rp 831.706.100			50 Orang	Rp 914.876.710
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Balangan	100% %	Rp 517.139.600			100% %	Rp 568.853.560
1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	Balangan	500 KK	Rp 252.910.800			500 KK	Rp 278.201.880
1	06	06	2.01	001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	500 Orang	Rp 252.910.800			500 Orang	Rp 278.201.880
1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	Balangan	31 Orang	Rp 264.228.800			31 Orang	Rp 290.651.680
1	06	06	2.02	002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	Balangan	31 Orang	Rp 264.228.800			31 Orang	Rp 290.651.680
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	Balangan	100% %	Rp 27.350.200			100% %	Rp 30.085.220
1	06	07	15	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	Balangan	1 Buah	Rp 27.350.200			1 Buah	Rp 30.085.220
1	06	07	2.01	002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Balangan	1 Makam	Rp 27.350.200			1 Makam	Rp 30.085.220

2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Rp	1.244.572.500				Rp	1.369.029.750		
2	8	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	Balangan		21,00 %	Rp	859.542.600			21,00 %	Rp	945.496.860
			8		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			72					72		
			8		IPG (Indeks Pembangunan gender)			92,74					92,74		
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Balangan		30 Lembaga Pemerintah	Rp	100.733.400			30 Lembaga Pemerintah	Rp	110.806.740
2	08	02	2.01	002 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan		1 Dokumen	Rp	21.636.400			1 Dokumen	Rp	23.800.040
2	08	02	2.01	003 Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan		1 Perangkat Daerah	Rp	79.097.000			1 Perangkat Daerah	Rp	87.006.700
2	08	02	2.02	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Balangan		3 Organisasi	Rp	758.809.200			3 Organisasi	Rp	834.690.120
2	08	02	2.02	001 Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan		1 Dokumen	Rp	-			1 Dokumen	Rp	-
2	08	02	2.02	002 Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Organisasi	Rp	758.809.200			3 Organisasi	Rp	834.690.120
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Balangan		100 %	Rp	24.324.800			100 %	Rp	26.757.280
2	08	03	2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Balangan		4 desa	Rp	-			4 desa	Rp	-
2	08	03	2.01	002 Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan		1 Perangkat Daerah	Rp	-			1 Perangkat Daerah	Rp	-
2	08	03	2.02	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Balangan		2 lembaga	Rp	24.324.800			2 lembaga	Rp	26.757.280
2	08	03	2.02	001 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Balangan		100 Orang	Rp	24.324.800			100 Orang	Rp	26.757.280
2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	Balangan		17,26 %	Rp	105.536.300			17,26 %	Rp	116.089.930
2	08	04	2.01	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	Balangan		61 %	Rp	71.913.100			61 %	Rp	79.104.410
2	08	04	2.01	003 Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan		1 Dokumen	Rp	71.913.100			1 Dokumen	Rp	79.104.410

2	08	04	2.03		Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	Balangan	77 %	Rp	33.623.200			77 %	Rp	36.985.520
2	08	04	2.03	001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Balangan	1 Layanan	Rp	33.623.200			1 Layanan	Rp	36.985.520
2	08	05			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	Balangan	100 %	Rp	59.362.400			100 %	Rp	65.298.640
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	Balangan	1 dokumen	Rp	59.362.400			1 dokumen	Rp	65.298.640
2	08	05	2.01	001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Balangan	1 Dokumen	Rp	34.299.200			1 Dokumen	Rp	37.729.120
2	08	05	2.01	002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	1 Dokumen	Rp	25.063.200			1 Dokumen	Rp	27.569.520
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	Balangan	68	Rp	120.939.200			68	Rp	133.033.120
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase Desa Layak Anak	Balangan	4 %	Rp	62.546.400			4 %	Rp	68.801.040
								5 desa					5 desa		
2	08	06	2.01	001	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Balangan	1 Organisasi	Rp	62.546.400			1 Organisasi	Rp	68.801.040
2	08	06	2.01	002	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	1 Dokumen	Rp	-			1 Dokumen	Rp	-
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Balangan	100 %	Rp	58.392.800			100 %	Rp	64.232.080
2	08	06	2.02	001	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	314 Anak	Rp	-			314 Anak	Rp	-
2	08	06	2.02	002	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	1 Dokumen	Rp	45.976.800			1 Dokumen	Rp	50.574.480
2	08	06	2.02	003	Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Balangan	2 Dokumen	Rp	-			2 Dokumen	Rp	-
2	08	06	2.02	004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	1 Dokumen	Rp	12.416.000			1 Dokumen	Rp	13.657.600
2	08	07			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	Balangan	100 %	Rp	74.867.200			100 %	Rp	82.353.920
2	08	07	2.01		Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Balangan	2 buah	Rp	9.896.400			2 buah	Rp	10.886.040
2	08	07	2.01	001	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	1 Perangkat D	Rp	9.896.400			1 Perangkat Da	Rp	10.886.040
2	08	07	2.02		Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	Balangan	78 indeks	Rp	54.844.400			78 indeks	Rp	60.328.840
2	08	07	2.02	001	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	1 Orang	Rp	54.844.400			1 Orang	Rp	60.328.840
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Balangan	4 lembaga	Rp	10.126.400			4 lembaga	Rp	11.139.040
2	08	07	2.03	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	1 Dokumen	Rp	10.126.400			1 Dokumen	Rp	11.139.040

2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Rp 12.884.038.400			Rp 14.172.442.240	
2	13	03		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	Balangan	1 Kerjasama	Rp 4.088.559.000		1 Kerjasama	Rp 4.497.414.900
2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	Balangan	1 Kerjasama	Rp 4.088.559.000		1 Kerjasama	Rp 4.497.414.900
2	13	03	2.01	003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan	Balangan	1 Dokumen	Rp 4.088.559.000		1 Dokumen	Rp 4.497.414.900
2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	Balangan	80 %	Rp 4.442.834.500		80 %	Rp 4.887.117.950
2	13	04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Balangan	154 Orang	Rp 4.442.834.500		154 Orang	Rp 4.887.117.950
2	13	04	2.01	001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi	Balangan	1 Dokumen	Rp 1.591.128.000		1 Dokumen	Rp 1.750.240.800
2	13	04	2.01	002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Balangan	1 Dokumen	Rp 27.623.200		1 Dokumen	Rp 30.385.520
2	13	04	2.01	003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Balangan	1 Dokumen	Rp 174.849.600		1 Dokumen	Rp 192.334.560
2	13	04	2.01	004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Balangan	1 Dokumen	Rp 395.953.200		1 Dokumen	Rp 435.548.520
2	13	04	2.01	009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Balangan	0 Laporan	Rp 1.541.832.900		1 Laporan	Rp 1.696.016.190
2	13	04	2.01	010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Balangan	0 Laporan	Rp 148.516.400		0 Laporan	Rp 163.368.040
2	13	04	2.01	013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Balangan	1 Dokumen	Rp 34.584.800		1 Dokumen	Rp 38.043.280
2	13	04	2.01	015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Balangan	154 desa	Rp 505.346.400		154 desa	Rp 555.881.040
2	13	04	2.01	018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Balangan	9 Dokumen	Rp 23.000.000		9 Dokumen	Rp 25.300.000
2	13	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	Balangan	50%	Rp 4.352.644.900		50%	Rp 4.787.909.390
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Balangan	10 Desa	Rp 4.352.644.900		10 Desa	Rp 4.787.909.390
2	13	05	2.01	003 Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Balangan	1 Lembaga	Rp 758.274.300		1 Lembaga	Rp 834.101.730
2	13	05	2.01	005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Balangan	1 Dokumen	Rp 1.992.284.300		1 Dokumen	Rp 2.191.512.730
2	13	05	2.01	006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balangan	1 Laporan	Rp 88.449.800		1 Laporan	Rp 97.294.780
2	13	05	2.01	009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Balangan	165 Dokumen	Rp 1.513.636.500		165 Dokumen	Rp 1.665.000.150

4.2 Analisis Sosial Ekonomi

Dalam dokumen perencanaan RENSTRA, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan dalam pelaksanaannya memiliki tiga urusan yang mencakup urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tujuan yang dinas miliki yaitu “Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”.

Mengacu pada penjelasan diatas, dimana dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat program-program yang dapat mendongkrak pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk tujuan meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial maka program tersebut meliputi Program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Bencana Alam. Selanjutnya untuk tujuan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak maka program tersebut meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Dan untuk tujuan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui program administrasi pemerintahan desa. Berikut ini penjelasan terkait program yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas sesuai dengan analisis sosial ekonomi:

1. Tujuan dan sasaran “meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”

Program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan sebuah aktivitas yang dimana memberikan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama dalam memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti yang diketahui bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu dengan dapat ditertanganinya pemerlu tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan sosial menghasilkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan harapan setelah adanya pemberian bantuan dalam bentuk pemulihan kepada kedudukan yang dahulu sehingga tujuan dari rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal dari para pemerlu tersebut, sehingga pemerlu tersebut dapat tetap memiliki harapan untuk tetap menjalani kehidupan dan kedudukan yang sama dengan yang lain. Hal tersebut sejalan dengan urusan bidang sosial yaitu bentuk pelayanan dasar.

Rehabilitasi sosial merupakan bentuk pelayanan yang diberikan sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam membantu dalam memulihkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu tentu memiliki dampak terutama aktivitas sosial ekonomi masyarakat, dimana dengan telah diberikan rehabilitasi kepada pemerlu tersebut maka secara pelan-pelan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan pelayanan dasar minimal telah dapat terpenuhi. Dengan begitu dampak sosial yang akan dirasakan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sudah dapat tertangani sehingga mereka mampu memiliki kemampuan dan rasa percaya diri dalam bergabung dengan masyarakat. Selanjutnya dampak ekonomi yang akan dirasakan dengan pemerlu tersebut telah memiliki keahlian akan membantu pemerintah dalam pengurangan angka pengangguran dan dengan kemampuan atau keahlian yang mereka miliki akan membantu terbukannya lapangan pekerjaan.

Selanjutnya mengacu pada jenis-jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yaitu korban bencana alam dan sosial. Melalui program perlindungan jaminan dan perlindungan sosial dan program

bencana alam akan membantu untuk dapat menangani persoalan-persoalan yang menyangkut kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan yang cepat guna membantu para korban bencana alam dan sosial. Bencana alam disini merupakan sebuah kondisi bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya untuk bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.

Dengan begitu melalui program-program tersebut dan kegiatan-kegiatan yang mendukung dapat berjalan dengan baik maka akan memiliki dampak terkait aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi jika para pemerlu tersebut tertangani dengan memberikan bantuan baik berupa moril dan material maka kegiatan kehidupan sosial ekonomi pelan-pelan akan pulih. Dengan demikian mereka dapat melanjutkan kehidupan berlangsungnya tatanan kehidupan sosial. Hal lain juga mereka akan memulai menata kehidupan terutama dalam mencari penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Perlindungan dan Jaminan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini bersifat memberikan pemulihan dan sebagai bentuk wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan.

2. Tujuan dan sasaran dinas “Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak”

Program-program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan sebuah program yang hadir dalam mendukung kehadiran perempuan untuk dapat memiliki keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan hadirnya program tersebut akan membantu dalam Menyusun sebuah kebijakan atau aturan yang memiliki sifat kesetaraan dan keadilan gender dalam

aspek kehidupan. Secara aspek sosial dan ekonomi tentu memiliki dampak. Berkaitan dengan aspek sosial tentu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan yang lebih terarah dalam kesetaraan gender tentu akan menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif baik bagi perempuan dan laki-laki, sebab setiap orang memiliki kesempatan atau peluang untuk dapat berkembang, berkarya, dan sama-sama memiliki kemampuan dalam ikut serta berkontribusi bagi bangsa dan negara. Secara aspek ekonomi dengan terlaksananya kesetaraan gender tentu memberi warna bagi perekonomian bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama. Dengan keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi serta didukung dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan hal tersebut tentu membantu menghasilkan perempuan yang memiliki nilai tambah berupa keahlian yang tentunya dengan keahlian yang dimiliki jika dipergunakan dengan baik serta dikembangkan dalam bentuk usaha maka akan membantu pertumbuhan perekonomian bagi suatu wilayah.

Lebih lanjut penjelasan tersebut juga sejalan dengan program perlindungan perempuan bahwa dengan adanya kesetaraan gender maka memiliki hubungan dengan adanya perlindungan bagi perempuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa perempuan juga memiliki kedudukan yang sama dengan pria sehingga pemenuhan akan hak-haknya dapat terpenuhi. Dengan begitu aspek sosial yang dirasakan bahwa melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat menjadi bukti dukungan bagi pemberian perlindungan sosial, sehingga persoalan-persoalan yang sering terjadi pada perempuan terutama dalam hal kekerasan, perdagangan orang hal tersebut pelan-pelan akan segera dapat teratasi.

3. Tujuan dan sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”.

Program yang mendukung dalam tercapainya tujuan tersebut adalah program administrasi pemerintahan desa. Dengan adanya program tersebut tentu akan membantu dalam memberikan pelayanan dalam

peningkatan dalam penyelenggaraan administrasi yang baik. Oleh sebab itu tentu program tersebut memiliki dampak sosial dan ekonomi. Dengan pemberian peningkatan administrasi yang baik akan membantu bagi pemerintah desa terutama dalam menyiapkan atau menyusun baik kebutuhan-kebutuhan dari pemerintahan dan masyarakat desa.

Dengan demikian administrasi pemerintahan desa dalam hal ini mempunyai peran dalam menunjang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa seperti halnya pelayanan publik yang pemerintah desa berikan jika dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Sebuah sistem yang baik dapat terlaksana jika didukung dengan administrasi yang ada dapat berjalan dengan baik pula. Dengan begitu siklus kehidupan masyarakat yang ada di desa dapat berjalan dengan baik karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan administrasi dapat dilakukan dengan cepat.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai aturan arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra kurun waktu satu tahun mendatang dan merupakan manifestasi dari respon Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun external, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Selanjutnya dokumen Renja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Rencana Kerja ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari anggaran dan semua aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta anggaran yang mendukung dan kinerja aparatur yang profesional, integritas, gotong royong serta agamis dalam penentu terhadap segala keberhasilan.

Akhir kata semoga penyusunan renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan.

Paringin, Juli 2022

Kepala Dinas, -



Drs. Urai Nur Iskandar, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730501 199311 1 001